

**STUDI ARAHAN PENATAAN FISIK AKTIVITAS PKL
DI KORIDOR JALAN SUDIRMAN
KOTA SALATIGA**

TUGAS AKHIR

Oleh:

HAPSARI NUGRAHESTI

L2D 098 433



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2003**

ABSTRAKSI

Keberadaan PKL di Koridor Jalan Sudirman yang kurang terwadahi dalam ruang menyebabkan PKL menyerobot ruang-ruang publik dan privat kota. Kondisi ini selain mengganggu sirkulasi jalan utama dan trotoar juga tampilan fisik dari bangunan formal yang melatarbelakanginya. Dari permasalahan ini, perlu adanya studi untuk menentukan pedoman arahan penataan aktivitas PKL di Koridor Jalan Sudirman. Studi ini dilakukan berdasarkan lima analisis, yaitu analisis aktivitas pengunjung, analisis pemilik/penghuni pertokoan Jalan Sudirman, analisis aktivitas PKL, analisis elemen perancangan, dan analisis kebutuhan ruang PKL. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif (komparatif dan deskriptif) serta kuantitatif yang menggunakan alat analisis Tabulasi Silang, Distribusi Frekuensi dan metode analisis perhitungan keruangan (spatial accounting model).

Dari hasil analisis ini diketahui temuan-temuan studi yang merupakan masukan bagi pedoman arahan penataan PKL. Sebagian besar PKL berpreferensi untuk tetap berjualan pada jenis usaha semula. Adanya hubungan signifikan antara jenis usaha dan sarana usaha menjadi dasar pertimbangan menentukan jenis sarana usaha PKL. Aktivitas PKL perlu ditempatkan pada ruang khusus yang terpisah dari jalur lalu lintas, sehingga konsumen aman dan nyaman. Waktu berjualan mengikuti aktivitas formal. Pola persebarannya memanjang mengelompok dan bercampur. Pola pengelolaan ruang berupa stabilisasi, dengan kebutuhan ruang yang disesuaikan dengan aktivitas dari jenis usaha dan sarana usaha PKL.

Dari temuan-temuan studi tersebut dapat ditentukan pedoman arahan bagi penataan aktivitas PKL. Tempat usaha PKL berada di samping jalur pedestrian, disisi luar arcade. Jenis usaha sesuai dengan aktivitas formal, dan sarana usahanya disesuaikan dengan jenis usahanya yakni meja untuk sembako, sandang, barang kelontong dan mainan anak, emas, jasa stempel. Gerobak untuk PKL makanan kecil, lauk-pauk, minuman, jasa tambal ban. Lemari kaca untuk jam, kaca mata, aksesoris, servis jam. Warung tenda untuk PKL makanan olahan. Pikulan untuk PKL minuman. Dan Kios untuk PKL bunga, tembakau, rokok. Pola persebaran aktivitas memanjang berkelompok, dalam 2 kategori PKL basah/kering. Waktu pelayanan PKL juga mengikuti waktu aktivitas formal, yakni pagi-sore hari (depan bangunan perkantoran dan pasar), dan pagi-malam hari (depan bangunan pertokoan). Sifat pelayanan PKL menetap dengan penggunaan sarana usaha yang mudah dipindah-pindah. Fasilitas PKL jalur pejalan kaki berada di ruang khusus dengan arkade. Parkir ditempatkan pada kantong-kantong parkir depan bangunan Pasaraya I dan II (pola parkir menyudut 90°) dan parkir on street (pola sejajar) pada selain peak hour pukul 13.00-14.00 dan 17.00-18.00. Untuk tata massa bangunan PKL disesuaikan dengan bangunan formal, yakni merah/oranye dan biru/hijau. Untuk bahan sarana usaha PKL merupakan bahan yang fungsional, ringan dan praktis (plastik, kayu, seng). Dan untuk bentuk bangunan PKL melihat pada bentuk bangunan formal yang didominasi pada bentuk balok/empat persegi panjang yakni lemari kaca, meja, gerobak, pikulan dan kios. Penempatannya diberi jarak untuk taman kecil sebagai ruang terbuka hijau. Pemasangan reklame hanya dibatasi pada sarana meja dan kios pada muka bangunan. Atau pada tiang yang berdiri sendiri, tidak menyatu PKL pada pertigaan Jalan Sukowati, Pemotongan dan Taman Pahlawan.

Keberadaan PKL di kawasan studi tetap dipertahankan, dengan disertai tindakan penataan ruang aktivitas dan penertiban aktivitas PKL yang jelas agar terkendali dan sesuai dengan kapasitas ruang. Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali mengenai peraturan yang mengatur aktivitas PKL yang sesuai dengan karakteristik PKL di Koridor Jalan Sudirman.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan kota yang merupakan sentra dari kegiatan ekonomi memunculkan suatu fenomena urbanisasi yang terjadi di negara-negara berkembang seperti yang terjadi di Indonesia. Urbanisasi telah menyebabkan ledakan jumlah penduduk kota yang sangat pesat, yang salah satu implikasinya adalah terjadinya penggumpalan tenaga kerja di kota-kota besar di Indonesia. Susahnya mencari pekerjaan di kota besar karena adanya tuntutan kapabilitas yang tinggi dan besarnya tingkat kompetisi antar individu dalam pencarian lapangan pekerjaan, menyebabkan kaum urbanis yang hanya didukung oleh modal ketrampilan yang terbatas seringkali tersingkir dari sektor formal. Kondisi ini menyebabkan para migran untuk berusaha masuk ke sektor informal yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, sektor informal dikenal sebagai katup pengaman dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan atau *holding tank* bagi mereka yang belum tertampung dalam sektor formal.

Selain adanya fenomena urbanisasi, faktor lain yang menyebabkan merebaknya keberadaan sektor informal adalah ketika terjadinya krisis ekonomi seperti di Indonesia. Akibat dari krisis ekonomi ini, laju pertumbuhan perekonomian menjadi menurun, dan jumlah lapangan kerja yang tersedia semakin terbatas. Tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal akhirnya terjun dalam sektor informal. Jadi pada dasarnya, aktivitas sektor informal ini merupakan bentuk perwujudan dari survival masyarakat, baik bagi kaum urbanis maupun mereka yang kehilangan pekerjaan sektor formal karena terimbas dari krisis ekonomi yang terjadi.

Faktor lainnya yang dapat dilihat dari eksistensi sektor informal perkotaan ini adalah kenyataan adanya dualisme ekonomi perdagangan di Indonesia. Dalam hal ini terdapat karakteristik keterpisahan dari satu sistem menjadi dua bagian, yaitu sektor

tradisional yang diasosiasikan sebagai sektor informal, dan sektor modern yang merupakan perwujudan dari sektor formal. Keberadaan sektor informal yang mampu memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan kapasitas *output*-nya yang potensial, memberikan pandangan bahwa sektor informal merupakan alternatif yang komplementer terhadap sektor formal (Rachbini, 1994:29). Namun dari kenyataan yang ada, kebijakan pemerintah daerah justru menerapkan kebijakan yang menyulitkan gerak sektor informal. Hal ini terbentur oleh adanya kepentingan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang nyaman, bersih dan indah, sehingga kurang adanya totalitas komitmen penyelesaian yang utuh yang mampu mendukung keberlangsungan aktivitas sektor informal. Kondisi yang tidak menguntungkan ini tidak menjadi suatu penghalang bagi sektor ini untuk terus berkembang. Hal ini dilihat dari semakin maraknya aktivitas sektor informal yang ditandai dengan banyaknya spot-spot baru lokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pengembangan kota. Kondisi ini membawa dampak dualisme bagi perkembangan kota. Di satu sisi, perkembangan aktivitas PKL ini merupakan salah satu potensi dan kesempatan ekonomi kota, yang sesuai dengan suatu pendapat yang menyatakan bahwa sektor informal merupakan benih-benih kewiraswastaan yang berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi kota (Mc Gee, 1973, Mazumdar, 1976; Sethuraman, 1985 dalam Yustika, 2000:188). Namun di sisi lainnya, keberadaan PKL yang kurang tertata seringkali menimbulkan masalah ruang fisik kota, yaitu menurunnya kualitas lingkungan fisik kota yang terkesan 'kumuh'. Kemudian, terjadinya penyerobotan ruang publik kota yakni jalan, trotoar, taman-taman kota dan lokasi strategis lainnya untuk ruang aktivitas PKL.

Kondisi seperti ini juga terjadi di Kota Salatiga, terutama di kawasan pusat kota dan kawasan CBD (*Central Bussiness District*) kota yang berada di Koridor Jalan Sudirman. Padatnya aktivitas PKL di kawasan ini, kurang diimbangi dengan ketersediaan lahan yang ada sehingga mereka cenderung menyerobot ruang-ruang publik kota: jalur pedestrian, jalan umum, emperan pertokoan, yang menimbulkan suasana yang tidak tertib dan menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan. Situasi yang tidak tertib ini terlihat dari terjadinya

kemacetan lalu lintas pada jalan utama terutama pada jam-jam puncak (*peak hour*). Hal ini disebabkan karena penataan ruang PKL dan parkir yang semrawut, serta penempatannya yang memakan badan jalan terutama untuk ruang parkir yang menempati tepi jalan raya (*on-street parking*) ± duapertiga badan jalan. Kondisi ini menimbulkan padatnya intensitas aktivitas pada jalan utama sehingga timbul ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dan pemakai jalan, karena jalan yang penuh dengan PKL dan kendaraan bermotor. Sedangkan kondisi menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan akibat aktivitas PKL ini ditandai dengan terjadinya kerusakan estetika lingkungan seperti ketidaksesuaian tampilan bangunan PKL dan bangunan formal yang melatarbelakanginya. Kemudian, juga disebabkan oleh PKL yang tidak membongkar kembali sarana dagangannya, dan kurang terpeliharanya kebersihan lingkungan kawasan, sehingga kawasan terlihat kumuh.

Permasalahan lainnya yang kurang mendukung keberadaan PKL di Koridor Jalan Sudirman yakni terlihat dalam hal regulasi mengenai penataan aktivitas PKL di kawasan tersebut. Dari hasil wawancara dengan staf Dinas Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga, terlihat bahwa kebijakan pemerintah kota yang diambil selama ini dalam menangani masalah PKL, masih bersifat sementara. Artinya, belum dibuat suatu kebijakan atau peraturan daerah yang khusus dan spesifik menangani masalah penataan aktivitas PKL. Sampai detik ini, peraturan yang dikeluarkan untuk menata PKL berupa SK Walikota, yang hanya berisi pengaturan lokasi dan waktu berdagang PKL. Sedangkan untuk pengaturan hal-hal lainnya mengenai PKL tidak disebutkan. Dalam penyusunan rencananya, pemerintah kota Salatiga kurang melakukan tindak lanjut dari rencana pada tingkatan sebelumnya mengenai pengelolaan aktivitas PKL. Rencana penataan PKL hanya terhenti pada buku-buku rencana (RTRW, RDTRK, RTRK) yang ada. Oleh karena itu, dengan menyadari permasalahan-permasalahan ini, perlu dilakukan studi mengenai arahan penataan fisik aktivitas PKL di Kawasan Koridor Jalan Sudirman Kota Salatiga, yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dan tercipta aktivitas PKL yang terkendali sesuai dengan kapasitas ruang yang tersedia.